

TESIS

**PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES
PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER**

***CONNECTIVITY CASE A JURIDICAL REVIEW OF THE HANDLING
PROCESS BEFORE AND AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE
ATTORNEY GENERAL IN THE MILITARY CRIMINAL FIELD***



Oleh:

IWAN KURNIAWAN

NIM.2210622023

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES
PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH
TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA
MILITER**

***CONNECTIVITY CASE A JURIDICAL REVIEW OF THE
HANDLING PROCESS BEFORE AND AFTER THE
ESTABLISHMENT OF THE ATTORNEY GENERAL IN THE
MILITARY CRIMINAL FIELD***



Oleh:

IWAN KURNIAWAN

NIM.2210622023

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES
PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH
TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA
MILITER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

IWAN KURNIAWAN

NIM.2210622023

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

Disusun dan diajukan oleh:

IWAN KURNIAWAN

NIM.2210622023

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2



Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002

TESIS

PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES
PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

Disusun dan diajukan oleh:

IWAN KURNIAWAN

NIM.2210622023

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Pada Tanggal 24 Juni 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,

M.H., M.Tr.Adm.Kes.

NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2



Dr. Beniharmoni Harefa S.H., LL.M.

NIP. 198709222018031002

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,

M.H., M.Tr.Adm.Kes.

NIP. 199304282022031009

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

NIP. 197006022021211004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Iwan Kurniawan
NIM : 2210622023
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Iwan Kurniawan
NIM.2210622023

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iwan Kurniawan
NIM : 2210622023
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSAAGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Iwan Kurniawan
NIM.2210622023

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul:

“PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER.”

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini. kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anter Venus, M.A., Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Bapak Dr. Suherman., S.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M. Tr. Adm. Kes. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang sekaligus merangkap selaku dosen Pembimbing I;
4. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa., S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang sekaligus merangkap selaku dosen Pembimbing II;
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I
6. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II.

7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis sehingga dapat disusun tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 24 Juni 2024

TTD

Iwan Kurniawan

ABSTRAK

PERKARA KONEKSITAS TINJAUAN YURIDIS PROSES PENANGANANNYA SEBELUM DAN SETELAH TERBENTUKNYA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

Iwan Kurniawan (2210622023), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri Wahyudi

Indonesia merupakan negara dengan bangsa yang besar dan beragam yang terdiri dari banyak pulau dan dari banyak budaya maupun adat istiadat yang di miliki. Dan daripada bangsa ini hidup dan diatur berdasarkan norma dan peraturan yang ada dan hidup di antara mereka sehingga membuat bangsa ini menjunjung tinggi suatu hukum yang mengatur daripada tatanan bermasyarakat, inilah mengapa Indonesia dapat di katakan sebagai negara hukum (*rechstat*), argumen ini dipertegas juga pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang dasar 1945 yang mana menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Ada empat sistem dalam Peradilan di Indonesia yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer serta peradilan tata usaha negara. Sistem-sistem ini berdiri secara independen, terpisah satu dengan lainnya dan memiliki fungsi serta wewenang mutlak dalam menjalankan tugas. Sehingga masing-masing sistem memiliki yurisdiksi yang tidak dapat diintervensi oleh sistem peradilan lainnya.

Akan tetapi walaupun Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang melanggar dan tidak mematuhi hukum yang berlaku dan atau bertindak sewenang – wenang dan tanpa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku, ini di tandai dari banyaknya kasus – kasus yang terjadi dan pelaku bukan hanya dari orang biasa namun kadangkala tindak pidana itu ada berbarengan dalam perbuatannya dengan anggota Militer atau yang biasa disebut sebagai TNI atau Tentara Nasional Republik Indonesia. Adanya kenyataan bahwa anggota TNI ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat dimana dengan status Istimewanya ditambah dorongan untuk meningkatkan taraf hidup atau motif ekonomi banyak diantara mereka melakukan tindak pidana bersama dengan masyarakat sipil baik sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan dan dalam beberapa kasus yang melibatkan anggota TNI dan sipil secara bersama-sama banyak menemui masalah dalam penanganannya. Berkaitan dengan hal diatas maka untuk efektifitas penanganan perkara koneksitas (pelaku melibatkan anggota TNI dan Sipil) kemudian dibentuk lembaga/organisasi khusus pada Kejaksaan RI yakni Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer.

Kata Kunci: negara hukum, sistem peradilan, tindak pidana, pelaku, koneksitas.

ABSTRACT

CONNECTIVITY CASE A JURIDICAL REVIEW OF THE HANDLING PROCESS BEFORE AND AFTER THE ESTABLISHMENT OF THE ATTORNEY GENERAL IN THE MILITARY CRIMINAL FIELD

Iwan Kurniawan (2210622023), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri Wahyudi

This Indonesia is a country with a large and diverse population, consisting of many islands and a multitude of cultures and customs. The people of this nation live and operate according to existing norms and regulations, coexisting within their midst, which upholds a high regard for a legal system governing societal order. This is why Indonesia can be referred to as a legal state (rechtsstaat), a notion further solidified by Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, which declares Indonesia as a legal state. There are four systems of justice in Indonesia: general courts, religious courts, military courts, and administrative courts. These systems stand independently, separate from one another, each with its own functions and absolute authority in carrying out its duties. Thus, each system possesses jurisdiction that cannot be interfered with by other judicial systems. However, despite Indonesia's respect for the law, there are also many Indonesians who violate and disregard the laws in place, acting arbitrarily and without adherence to regulations and existing laws. This is evidenced by the numerous cases that occur, with perpetrators not only being ordinary citizens but sometimes also engaging in criminal acts alongside military personnel, commonly known as the TNI or the Indonesian National Armed Forces. The fact that TNI members exist and live among the civilian population, with their special status, combined with the drive to improve their standard of living or economic motives, leads many of them to engage in criminal activities with civilians, whether as perpetrators, accomplices, or assistants. In several cases involving both TNI members and civilians, they encounter difficulties in their handling. In connection with the above, to enhance the effectiveness of handling connectivity cases (involving perpetrators from both the TNI and civilians), a special institution/organization was established within the Indonesian Attorney General's Office, namely the Deputy Attorney General for Military Crime Affairs.

Keywords: state, judiciary system, criminal offenses, perpetrators, connectivity.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teoritis	18
1. Teori Perlindungan Hukum	18
2. Teori Pidana	20
B. Kerangka Pikir atau Bagan Kerangka Pikir	23
C. Definisi Operasional	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	34

BAB IV	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Proses Penanganan Perkara Koneksitas sebelum dan setelah terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer	36
B. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses penuntutan perkara Koneksitas yang disidangkan di Pengadilan Militer dan sebaliknya peran Oditur dalam perkara Koneksitas yang disidangkan di Peradilan Umum/Sipil	88
BAB V	101
PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104